

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENGAJUAN KLAIM
ASURANSI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
DI BIDANG ASURANSI (Studi di Polrestabes Surabaya)**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Rizqia Gita Astiriani
0910111047



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
PENGAJUAN KLAIM ASURANSI TERKAIT
TINDAK PIDANA PENIPUAN DI BIDANG
ASURANSI (Studi di Polrestabes Surabaya)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Rizqia Gita Astiriani**
b. NIM : **0910111047**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka waktu penelitian : **6 bulan**

Disetujui pada tanggal : 4 Februari 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sri Letariningsih, S.H. M.Hum
NIP. 19681102 199003 2 001

Yuliati, S.H. LL.M.
NIP. 19660710 199203 2 003

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjanti, S.H. M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENGAJUAN KLAIM
ASURANSI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI
BIDANG ASURANSI
(Studi di Polrestabes Surabaya)**

Rizqia Gita Astiriani

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: fhubasti@ymail.com

ABSTRACT

Indonesia's economic growth and growing community of thought followed by the advance in the effort to make the number of commercial insurance business lately. This is understandable given the increasing pace of development in Indonesia in various sectors of life and may lead to increased risk. This study, a juridical sociological study with a qualitative approach to primary data and secondary data. The results of the research is the implementation of criminal investigations in the field of insurance fraud against insurance claim based on Article 381 of the Criminal Code and Law no use. 2 of 1992 concerning the business of insurance. Stage of the investigation does not lead to the prosecution stage, this is due to the application SP3 conducted by investigators to resolve these cases. Thus it can be said that the implementation of the investigation is not running optimally. Settlement through mediation penal applied by the parties in resolving cases of criminal fraud in insurance. In addition there are some constraints experienced investigators during the investigation process. Constraints are related to internal constraints, including lack of understanding of the rules of the Criminal Code investigation, investigators lack of understanding of the witness' testimony and the lack of facilities and infrastructure. And external constraints include lack of cooperation with other institutions, the time of the crime (tempus delicti) is relatively long, unclear addresses of witnesses and suspects as well as the level of honesty of the witnesses. So the investigators Polrestabes Surabaya take action to address these constraints.

Keywords : Investigation, Insurance Claims, Fraud Crimes

ABSTRAKSI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dan diikuti oleh majunya pemikiran masyarakat dalam usaha perniagaan membuat banyaknya usaha asuransi akhir-akhir ini. Hal ini dapat dipahami mengingat meningkatnya laju pembangunan di Indonesia pada berbagai sektor kehidupan dan dapat mengakibatkan peningkatan risiko yang dihadapi. Penelitian ini, merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil yang didapat dari penelitian adalah, pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan di bidang asuransi terhadap pengajuan klaim

asuransi didasarkan pada Pasal 381 KUHP dan tidak menggunakan UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Tahap penyidikan tidak berlanjut ke tahap penuntutan, hal ini karena diterapkannya SP3 yang dilakukan oleh penyidik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penyidikan tidak berjalan optimal. Penyelesaian perkara melalui jalur mediasi penal diterapkan oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penipuan di bidang asuransi. Selain itu terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik selama proses penyidikan. Kendala tersebut terkait dengan kendala internal, meliputi kurangnya pemahaman penyidik terhadap aturan dalam KUHP, kurangnya pemahaman penyidik terhadap keterangan saksi serta kurangnya sarana dan prasarana. Dan kendala eksternal meliputi kurangnya kerjasama dengan institusi lain, waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) yang relatif sudah lama, ketidakjelasan alamat dari saksi dan tersangka serta tingkat kejujuran dari para saksi. Sehingga penyidik Polrestaes Surabaya mengambil tindakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Kata Kunci : Penyidikan, Klaim Asuransi, Tindak Pidana Penipuan

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dan diikuti oleh majunya pemikiran masyarakat dalam usaha perniagaan membuat banyaknya usaha asuransi akhir-akhir ini. Hal ini dapat dipahami mengingat meningkatnya laju pembangunan di Indonesia pada berbagai sektor kehidupan dan dapat mengakibatkan peningkatan risiko yang dihadapi. Risiko ini dapat timbul dalam berbagai bentuk, seperti kerusakan alat-alat, terganggunya transportasi, rusaknya proyek hasil pembangunan, kehilangan barang-barang berharga dan lain-lain. Lembaga asuransi atau pertanggungan dalam kondisi tersebut mempunyai fungsi sebagai lembaga yang akan mengalihkan risiko yang mungkin timbul atau dihadapi dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung).

Dalam perspektif hukum Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.¹ Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat antara

¹ Khotibul Umam, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal 5.

satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen risiko, asuransi dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu risiko. Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang, baik karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan dan sebab lainnya.

Kelemahan pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap kasus pengajuan klaim asuransi sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan. Secara sederhana dapat dijabarkan bahwa seseorang yang ingin mengalihkan risiko yang akan timbul diharuskan membayar premi kepada perusahaan asuransi, kemudian apabila risiko itu benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan maka adalah suatu kewajiban bagi pihak asuransi untuk membayar klaim tersebut. Namun dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Sebagai contoh adalah kasus Danudjiwo Sukardjo alias Jemy (45) warga Graha Famili blok R/196 Surabaya yang mengajukan klaim ke Axa Financial Indonesia dengan alasan sakit. Danu yang menjadi agen asuransi Axa dengan premi Rp 2 Juta per bulan mendapatkan klaim senilai Rp 20 Juta. Namun setelah ditelusuri oleh pihak Axa, Danu ternyata melakukan tindak pidana penipuan. Ia tidak dirawat di Rumah Sakit Marien di Jalan Raya Darmo Permai Selatan kota Surabaya karena sakit tifus. Danu yang bekerjasama dengan salah satu staf rumah sakit (LI) membuat keterangan palsu. Dengan surat itulah Danu melakukan pengajuan klaim asuransi.²

Dalam tatanan hukum Indonesia tindak pidana penipuan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 378. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana asuransi, maka perbuatan curang (*fraud*) terhadap perusahaan asuransi diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disamakan dengan tindak pidana penipuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 381 KUHP. KUHP berusaha memberikan perlindungan bagi industri asuransi dengan mengkriminalisasikan persetujuan pertanggungan yang dibuat

² Imam Wahyudiyanta, *Ditetapkan Jadi Tersangka, Pelaku Penipuan Klaim Asuransi Kabur*, artikel pada harian detik Surabaya edisi Selasa 17 November 2009, <http://www.surabaya.detik.com>, tanggal akses 23 Juli 2012.

antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan konsumen sebagai tertanggung/pemegang polis. Berkenaan dengan perbuatan curang terhadap pihak asuransi, maka dapat disinggung pula mengenai keterkaitan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.

Dalam pembahasan ini, tidak digunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), karena dalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan ketentuan pidana yang berkaitan dengan perbuatan curang yang dilakukan oleh penanggung risiko terhadap perusahaan asuransi sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan hampir tidak ada satu pasal pun dalam UU Asuransi yang secara tegas mengatur tentang perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak tertanggung terhadap pihak penanggung.

Fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.³ Oleh karena itu barang siapa yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut maka dapat dikenai sanksi pidana.

Untuk menegakkan dan melaksanakan peraturan yang telah dibuat, diperlukan sebuah lembaga penegak hukum. Di Indonesia fungsi tersebut dijalankan oleh Polri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada hakekatnya tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua tugas pokok tersebut menggambarkan peran utama Polri yaitu sebagai alat penegak hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pengajuan klaim asuransi terkait dengan tindak pidana penipuan di bidang asuransi ?

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 15.

2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi sehingga penyidikan dapat berjalan dengan optimal ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan yaitu di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

Metode pendekatan yang digunakan untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah metode *Yuridis Sosiologis*. Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.⁴

Pengumpulan data primer diperoleh melalui cara *interview* atau wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang termasuk objek penelitian.⁵ Wawancara dilakukan dengan menggunakan tipe wawancara terarah (*directive interview*) dan wawancara tidak terarah (*indirective interview*). Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan bahan-bahan literatur yaitu UU dan Peraturan-Peraturan yang membahas tentang tindak pidana penipuan di bidang asuransi, buku-buku yang membahas tentang asuransi, penelusuran situs internet, penelusuran dokumen di Polrestabes Surabaya.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986, hal 10.

⁵ *Ibid.*, hal 59.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁶

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Polrestabes Surabaya dan Realita Kasus Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Asuransi di Unit Pidana Ekonomi Polrestabes Surabaya

Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya) dipimpin oleh seorang kepala kepolisian resort kota besar Surabaya (Kapolrestabes Surabaya) yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) sebagai pucuk pimpinan pemegang komando. Polrestabes Surabaya adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kota yang berada di bawah Kapolda. Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya adalah Pelaksana Utama Kewilayahan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan penegak hukum serta tugas-tugas Polri lainnya dalam wilayah hukum kota Surabaya.

Polrestabes Surabaya berlokasi di Jalan Sikatan No. 1 Surabaya, dipimpin oleh Kombes Polisi Coki Manurung pada periode Agustus 2010 hingga Januari 2012, selanjutnya digantikan oleh Kombes Polisi Tri Maryanto pada tanggal 2 Februari. Polrestabes Surabaya memiliki visi dan misi yakni terwujudnya pelayanan Kamtibmas Prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

Penulis terfokus untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pada bagian SatReskrim tepatnya di Unit Pidana Ekonomi. Pada tahun 2012 Unit Pidana Ekonomi telah menangani 8 (delapan) kasus diantaranya 4

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 107.

(empat) kasus penipuan, 1 (satu) kasus tindak pidana pemalsuan surat, serta 3 (tiga) kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan.

2. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Asuransi Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi

Tindak pidana penipuan di bidang asuransi yang berhasil diungkap di wilayah hukum Polrestabes Surabaya dalam kurun waktu 10 (sepuluh tahun) yakni dari tahun 2000 hingga tahun 2010 adalah 1 (satu) kasus, yaitu yang terjadi pada akhir tahun 2009. Tindak pidana penipuan di bidang asuransi yang dilakukan oleh seorang karyawan yang bernama Danudjiwo Sukardjo atau yang lebih dikenal dengan nama Jemy, yang memang menjadi agen asuransi AXA Financial dengan premi Rp 2 juta per bulan. Dan korban dari tindak pidana penipuan dalam kasus ini adalah pihak asuransi yakni AXA Financial. Dalam pengajuan klaim asuransi Jemy menggunakan alasan sakit hingga membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sehingga pihak AXA Financial mengabulkan permohonan klaim yang diajukan oleh Jemy. Namun setelah ditelusuri pihak AXA, ternyata Jemy telah melakukan tindak pidana penipuan. Hal ini terbukti dengan keterangan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Marien di Jalan Raya Darmo Permai Selatan kota Surabaya. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa Jemy tidak pernah dirawat di rumah sakit tersebut karena sakit *thypus*.⁷

Untuk mengungkap tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi yang dilakukan oleh Jemy, tim yang dibentuk untuk menyelidiki kegiatan-kegiatan pelaku bertujuan untuk mengetahui apakah benar yang dilakukan merupakan serangkaian aksi penipuan atau pelaku benar-benar menderita sakit seperti yang disebutkan dalam surat keterangan dokter. Dalam proses penyelidikan tersebut, diperkirakan memakan waktu hingga 2 (dua) minggu. Penggerebekan dilakukan pada waktu yang diperkirakan dengan matang bahwa pelaku dalam hal ini Jemy sedang berada di rumah. Namun perkiraan tersebut kurang tepat. Jemy yang mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan telah

⁷ Hasil wawancara dengan AKP Marsono di Unit Satreskrim Polrestabes Surabaya tanggal 8 Desember 2012

dilaporkan kepada pihak berwajib, langsung melarikan diri dan menghilang pada saat polisi melakukan penggerebekan.⁸

Langkah-langkah yang diambil Penyidik Polrestabes Surabaya dalam mengungkap tindak pidana penipuan di bidang asuransi yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, adalah sebagai berikut:⁹

1. Adanya laporan dari masyarakat
2. Identifikasi perkara dari penyidik
3. Menindaklanjuti laporan, apabila :
 - a. Kasus Pidana
 - b. Adanya alat bukti yang cukup
4. Membuat pemberkasan tahap penyidikan

Apabila kelengkapan administrasi sudah dipenuhi, maka penyidik dapat langsung melakukan proses penyidikan. Pertama-tama penyidik menuju ke TKP, tindakan yang dilakukan penyidik di TKP adalah untuk mencari keterangan, petunjuk, identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyidikan selanjutnya, serta mengumpulkan bukti-bukti baik di tempat kejadian perkara maupun di tempat lain yang memungkinkan ditemukannya bukti-bukti lain sehingga membuat terang suatu tindak pidana penipuan di bidang asuransi yang sedang terjadi.

Berdasarkan Pasal 39 KUHAP mengenai benda sitaan, maka alat bukti yang biasa ditemukan dan dapat dikenakan penyitaan dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan di bidang asuransi adalah :

- a. Surat keterangan dokter
- b. Surat rekam medis
- c. Bukti pengajuan klaim asuransi
- d. Bukti pencairan dana klaim asuransi
- e. Uang hasil pengajuan klaim asuransi

⁸ Hasil wawancara dengan Bripta Yudi Astriono di Unit Satreskrim Polrestabes Surabaya tanggal 8 Desember 2012

⁹ Hasil wawancara dengan Kanit Pidek AKP Akhyar di Polrestabes Surabaya tanggal 24 Desember 2012

Dalam kasus Jemy, penyidik berhasil mendapatkan alat bukti berupa surat rekam medis dari dokter yang memberikan kesaksian di Polrestaes Surabaya. Berdasarkan Pasal 52 huruf e UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasien berhak mendapatkan isi rekam medis. Dan dalam kasus Jemy, ia mengaku tidak memiliki surat rekam medis mengenai penyakit yang dideritanya seperti yang disebutkan dalam surat keterangan dokter, dan selanjutnya digunakan sebagai persyaratan pengajuan klaim *reimbursement*.¹⁰

Rekam medis memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam bidang kesehatan termasuk upaya penegakan hukum terutama di dalam rangka pembuktian dugaan malpraktek medis. Rekam medis di dalam hukum acara pidana mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat karena pembuatan rekam medis telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 187 KUHAP.

Dalam kasus Jemy, surat rekam medis sangat berperan sebagai alat bukti tertulis. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik merasa kesulitan untuk mendapatkan alat bukti tersebut.¹¹ Dan kesulitan untuk mendapatkan alat bukti tertulis tersebut dapat diatasi dengan menggunakan dasar hukum yakni Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai manfaat rekam medis sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum. Namun dalam prakteknya, penyidik menggunakan undang-undang kesehatan sebagai landasan penyitaan alat bukti tertulis berupa surat rekam medis. Dan langkah yang diambil penyidik untuk menggunakan undang-undang kesehatan sebagai landasan penyitaan alat bukti tertulis tersebut berhasil. Penyidik berhasil mendapatkan alat bukti tertulis berupa surat rekam medis dari dokter yang memeriksa pelaku tindak pidana penipuan di bidang asuransi.

Dalam penemuan bukti tertulis berupa surat keterangan dokter, dapat dinyatakan bahwa dokter yang terlibat dalam aksi pelaku tindak pidana

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bripka Yudi Astriono di Unit Satreskrim Polrestaes Surabaya tanggal 8 Desember 2012

¹¹ Hasil wawancara dengan Bripka Yudi Astriono di Unit Satreskrim Polrestaes Surabaya tanggal 8 Desember 2012

penipuan di bidang asuransi tersebut merupakan seseorang yang turut serta membantu kelancaran pelaksanaan aksi tindak pidana penipuan di bidang asuransi. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti berupa surat rekam medis. Surat rekam medis tidak akan ada tanpa melalui tindakan dokter. Dan sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyebutkan seseorang yang turut serta melakukan perbuatan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Namun pada kenyataannya, dokter tersebut tidak diberi sanksi pidana dengan alasan dokter tersebut tidak mengetahui bahwa surat rekam medis yang dibuat untuk pasiennya yang bernama Danudjiwo Sukardjo alias Jemy hendak digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan klaim asuransi.

Dalam surat rekam medis tersebut dapat dinyatakan pula bahwa pasien bernama Danudjiwo Sukardjo alias Jemy tidak menderita penyakit yang dijelaskan dalam surat keterangan dokter yang selanjutnya digunakan sebagai persyaratan pengajuan klaim asuransi. Sehingga terbukti bahwa pengajuan klaim asuransi yang dilakukan oleh Jemy merupakan tindak pidana penipuan di bidang asuransi.¹²

Apabila dikaitkan dengan peraturan yang termuat dalam KUHP, Jemy dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP, Pasal 378 KUHP serta Pasal 381 KUHP. Hal ini berkaitan dengan unsur-unsur yang termuat dalam rumusan ketiga Pasal pada KUHP. Namun dalam pelaksanaannya penyidik hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada Jemy dengan Pasal 263 KUHP dan Pasal 378 KUHP saja, dengan alasan Jemy telah melakukan tindak pidana penipuan secara umum. Selain itu penyidik juga menyebutkan apabila Jemy dikenai sanksi pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 381 KUHP kurang tepat, karena sanksi pidana dalam Pasal 381 KUHP lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi pidana dalam Pasal 378 KUHP.¹³ Namun, berdasarkan analisa kasus dengan merujuk pada unsur yang termuat pada rumusan pasal dalam KUHP, selain Pasal 263 KUHP dan Pasal 378 KUHP Jemy juga dapat dikenakan sanksi seperti yang termuat dalam Pasal 381 KUHP. Dalam Pasal

¹² Hasil wawancara dengan Bripka Yudi Astriono di Unit Satreskrim Polrestabes Surabaya tanggal 8 Desember 2012

¹³ Hasil wawancara dengan Bripka Yudi Astriono di Unit Satreskrim Polrestabes Surabaya tanggal 8 Desember 2012

381 KUHP tersebut dijelaskan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tipu muslihat terhadap pihak asuransi.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan diketahui telah terjadi tindak pidana penipuan di bidang asuransi, maka penyidik segera melakukan proses penyidikan selanjutnya, yaitu penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti.

Setelah melalui tahap penahanan dan pemeriksaan tersangka yang berjalan dalam jangka waktu satu hari, Jemy pelaku tindak pidana penipuan di bidang asuransi ditanggguhkan oleh penyidik dengan alasan sakit. Proses penangguhan penahanan tersebut didasarkan oleh surat rekam medis dari kepolisian yang menyatakan bahwa tersangka pelaku tindak pidana penipuan di bidang asuransi tersebut memang benar menderita sakit *thypus*. Dan setelah ditanggguhkan selama satu minggu, tersangka tindak pidana penipuan di bidang asuransi tersebut melakukan permohonan untuk penghentian penyidikan. Hal tersebut dilakukan dengan syarat tersangka bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh pihak asuransi yakni uang senilai enam juta tujuh ratus ribu rupiah. Tersangka memenuhi persyaratan tersebut dan pihak asuransi yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan di bidang asuransi tersebut menyetujuinya.¹⁴

Adanya tindakan dari pihak tersangka yang beritikad untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban dan persetujuan dari pihak korban dalam hal ini pihak perusahaan asuransi untuk menghentikan penyidikan, maka penyidik beranggapan bahwa kasus tersebut patut untuk dihentikan. Selain itu penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara tidak harus masuk ke meja hijau (*Restoratif Justice*), dan penyidik juga menggunakan asas keadilan sebagai dasar dibuatnya surat perintah penghentian penyidikan.¹⁵

Namun, penghentian penyidikan dalam kasus Jemy tidak memenuhi alasan limitatif yang telah disebutkan dalam pasal 109 ayat (2) KUHP. Hal ini karena dalam kasus Jemy telah ditemukan bukti yang cukup untuk

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bripka Yudi Astriono di Unit Satreskrim Polrestabes Surabaya tanggal 8 Desember 2012

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Yudi Astriono di Unit Satreskrim Polrestabes Surabaya tanggal 8 Desember 2012

membuktikan kesalahan tersangka, misalnya telah ditemukannya barang bukti berupa surat keterangan dokter yang dianggap palsu dan surat rekam medis. Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh Jemy dapat dirumuskan sebagai tindak pidana. Hal ini berdasarkan pada hasil identifikasi perkara oleh penyidik, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Jemy merupakan tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana penipuan. Dan alasan penghentian penyidikan demi hukum juga bukan merupakan alasan yang tepat untuk penghentian kasus Jemy. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik Polrestabes Surabaya merupakan tindakan yang kurang tepat.

Tindakan ganti kerugian yang dilakukan oleh Jemy sebagai pelaku tindak pidana penipuan di bidang asuransi terhadap korban yakni, pihak asuransi AXA Financial merupakan tindakan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi penal. Jalur mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang lazim diterapkan terhadap perkara perdata. Secara umum, mediasi perdata bertujuan untuk mencapai kesepakatan, namun mediasi penal lebih terfokus pada terciptanya dialog yang konstruktif dengan penekanan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan kerusakan/penderitaan yang telah terjadi. Mediasi penal dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana atau semua tipe tindak pidana. Mediasi penal biasa digunakan untuk menangani tindak pidana pencurian dan tindak pidana ringan lainnya termasuk tindak pidana penipuan di bidang asuransi. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan korban, mediasi penal juga digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana berat seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Mediasi penal dapat dilaksanakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Mediasi penal juga dapat diterapkan pada pelaku pemula yang baru pertama kali melakukan kejahatan atau bahkan residivis yang telah berulang kali melakukan kejahatan.¹⁶ Pada tindak pidana penipuan di bidang

¹⁶ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 65.

asuransi yang dilakukan oleh Jemy, mediasi penal dilakukan pada saat tahap kebijakan penyidik kepolisian dan Jemy merupakan pelaku pemula yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan di bidang asuransi tidak ada perbedaan prosedur dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan pada umumnya. Secara garis besar prosedur penyidikan antara tindak pidana satu dengan tindak pidana yang lain sama.¹⁷

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan di bidang asuransi tidak menggunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), karena dalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan ketentuan pidana yang berkaitan dengan perbuatan curang yang dilakukan oleh penanggung risiko terhadap perusahaan asuransi sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan hampir tidak ada satu pasal pun dalam UU Asuransi yang secara tegas mengatur tentang perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak tertanggung terhadap pihak penanggung. Selain itu tidak ada suatu aturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyidikan dan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan proses penyidikan terkait tindak pidana yang terjadi dalam perasuransian. Sehingga untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana penipuan di bidang asuransi dapat digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukumnya.

Berdasarkan serangkaian tindakan yang telah dilakukan penyidik mulai dari proses penyelidikan hingga proses penahanan tersangka tindak pidana penipuan di bidang asuransi, dapat disebutkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan di bidang asuransi terhadap pengajuan klaim asuransi tidak berjalan optimal. Hal ini karena penerapan SP3 yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan kasus tersebut juga tidak sesuai dengan alasan-alasan limitatif yang telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2)

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kanit Pidek AKP Akhyar di Polrestabes Surabaya tanggal 8 Januari 2013

KUHAP. Selain itu terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik selama proses penyidikan.

3. Kendala dan Upaya yang Dilakukan Penyidik Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Asuransi Sehingga Penyidikan Dapat Berjalan dengan Optimal

3.1 Kendala Penyidik dalam Mengatasi Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Asuransi

Dalam mengungkap tindak pidana di bidang asuransi yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, bukanlah perkara yang mudah. Hal ini berkaitan dengan kendala yang dihadapi penyidik Polrestabes Surabaya dalam pencarian dan penemuan barang bukti. Dalam kasus Jemy, penyidik menyatakan kesulitan dalam penemuan alat bukti seperti surat keterangan dokter dan surat rekam medis yang bersifat rahasia. Namun setelah pencarian berlangsung cukup lama, penyidik berhasil menemukan alat bukti tertulis tersebut. Selain berlangsung cukup lama, untuk mendapatkan alat bukti tertulis berupa surat keterangan dan surat rekam medis yang bersifat rahasia tersebut penyidik juga mengalami kesulitan dalam proses penyitaan alat bukti. Dan untuk mengatasi kesulitan yang dialami tersebut, penyidik menggunakan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 sebagai dasar hukum penyitaan barang bukti.

Selain itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mengungkap tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Kendala-kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana penipuan di bidang asuransi, meliputi :

1. Kurangnya Pemahaman Penyidik Terhadap Aturan dalam KUHP

2. Kurangnya Pemahaman Penyidik Terhadap Keterangan Saksi¹⁸
 3. Kurangnya Sarana dan Prasarana¹⁹
- b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana penipuan di bidang asuransi, meliputi :

1. Kurangnya Kerjasama Antara Penyidik dengan Institusi Lain Terkait Penyitaan Barang Bukti
2. Waktu Kejadian Perkara (*Tempus Delicti*) yang Relatif Sudah Lama
3. Ketidakjelasan Alamat dari Saksi dan Tersangka dalam Rangka Pemeriksaan di Penyidikan²⁰
4. Tingkat Kejujuran Para Saksi dalam Memberikan Keterangan²¹

3.2 Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Asuransi Sehingga Penyidikan Dapat Berjalan dengan Optimal

Berbagai kendala yang dihadapi oleh Penyidik di Polrestabes Surabaya dalam mengungkap tindak pidana penipuan di bidang asuransi yang terjadi di wilayahnya, tentu saja membutuhkan perhatian ekstra untuk mengatasinya. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polrestabes Surabaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengungkap tindak pidana penipuan di bidang asuransi, antara lain:

- a. Upaya Mengatasi Kendala Internal

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kanit Pidek AKP Akhyar di Polrestabes Surabaya tanggal 24 Desember 2012

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kanit Pidek AKP Akhyar di Polrestabes Surabaya tanggal 24 Desember 2012

²⁰ Hasil wawancara dengan Kanit Pidek AKP Akhyar di Polrestabes Surabaya tanggal 24 Desember 2012

²¹ Hasil wawancara dengan Bripta Yudi Astriono di Unit Satreskrim Polrestabes Surabaya tanggal 8 Desember 2012

Upaya mengatasi kendala internal yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana penipuan di bidang asuransi, meliputi :

1. Mengadakan Sosialisasi Secara Internal Pada Para Penyidik Kepolisian²²
2. Mendatangkan Saksi Ahli Berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Asuransi²³
3. Memaksimalkan Koordinasi dengan Pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur²⁴

b. Upaya Mengatasi Kendala Eksternal

Upaya mengatasi kendala eksternal yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana penipuan di bidang asuransi, meliputi :

1. Meningkatkan Kerjasama dengan Institusi Lain Terkait Penyitaan Barang Bukti
2. Segera Melaksanakan Proses Penyidikan
3. Koordinasi dengan Masyarakat Khususnya Perangkat Desa²⁵
4. Membuktikan Kebenaran Atas Keterangan yang Diberikan Oleh Para Saksi²⁶

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan penyidikan terhadap pengajuan klaim asuransi terkait tindak pidana penipuan di bidang asuransi dalam segi teori mengacu pada Pasal 1 angka 1 KUHAP tentang penyidikan serta dikaitkan dengan Pasal 263

²² Hasil wawancara dengan Kanit Pidek AKP Akhyar di Polrestabes Surabaya tanggal 24 Desember 2012

²³ Hasil wawancara dengan Kanit Pidek AKP Akhyar di Polrestabes Surabaya tanggal 24 Desember 2012

²⁴ Hasil wawancara dengan Kanit Pidek AKP Akhyar di Polrestabes Surabaya tanggal 24 Desember 2012

²⁵ Hasil wawancara dengan Kanit Pidek AKP Akhyar di Polrestabes Surabaya tanggal 24 Desember 2012

²⁶ Hasil wawancara dengan Bripta Yudi Astriono di Unit Satreskrim Polrestabes Surabaya tanggal 8 Desember 2012

KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat keterangan dan Pasal 381 KUHP tentang tindak pidana penipuan di bidang asuransi, akan tetapi dalam pelaksanaannya penyidik Polrestabes Surabaya hanya menjerat pelaku tindak pidana penipuan di bidang asuransi berdasarkan Pasal 263 KUHP dan Pasal 378 KUHP tanpa menyertakan pasal 381 KUHP. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan di bidang asuransi terhadap pengajuan klaim asuransi tidak berjalan optimal. Hal ini juga disebabkan karena adanya beberapa kendala yang dialami penyidik selama proses penyidikan. Selain itu penerapan SP3 yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan kasus tersebut juga tidak sesuai dengan alasan-alasan limitatif yang telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Penyelesaian perkara melalui jalur mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*), dan jalur tersebut diterapkan oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penipuan di bidang asuransi dengan cara melakukan tindakan ganti kerugian yang dilakukan pelaku tindak pidana penipuan di bidang asuransi terhadap korban yakni, pihak asuransi AXA Financial.

- b. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Surabaya dalam mengungkap tindak pidana penipuan di bidang asuransi yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya adalah adanya kendala internal dan kendala eksternal. Terdapat tiga kendala internal yang dialami penyidik Polrestabes Surabaya, diantaranya kurangnya pemahaman penyidik terhadap aturan dalam KUHP, kurangnya pemahaman penyidik terhadap keterangan saksi serta kurangnya sarana dan prasarana. Selain kendala internal, terdapat empat kendala eksternal yang dialami penyidik Polrestabes Surabaya, antara lain kurangnya kerjasama antara penyidik dengan institusi lain terkait penyitaan barang bukti, waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) yang relatif sudah lama, ketidakjelasan alamat dari saksi dan tersangka dalam rangka pemeriksaan di penyidikan serta tingkat kejujuran para saksi dalam memberikan keterangan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik Polrestabes Surabaya untuk

mengatasi kendala-kendala dalam mengungkap tindak pidana penipuan di bidang asuransi, antara lain dengan melakukan tiga upaya untuk mengatasi kendala internal, yakni dengan mengadakan sosialisasi secara internal pada para penyidik kepolisian, mendatangkan saksi ahli berkaitan dengan tindak pidana penipuan di bidang asuransi serta memaksimalkan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur. Selain itu, penyidik Polrestabes Surabaya juga melakukan empat upaya untuk mengatasi kendala eksternal, diantaranya dengan meningkatkan kerjasama dengan institusi lain terkait penyitaan barang bukti, segera melaksanakan proses penyidikan, koordinasi dengan masyarakat khususnya perangkat desa serta membuktikan kebenaran atas keterangan yang diberikan oleh para saksi.

2. Saran

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terkait tindak pidana penipuan di bidang asuransi, khususnya tindak pidana penipuan di bidang asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung terhadap pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung resiko.
- b. Bagi masyarakat, dapat secara cermat mengetahui sanksi yang akan diterima apabila terbukti melakukan kejahatan pengajuan klaim asuransi dengan cara tipu muslihat, agar tidak terjadi pelanggaran atas aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Abdul Syukur, Fatahillah. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI PRESS. Jakarta.

Umam, Khotibul. 2011. *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet :

Imam Wahyudiyanta, 2009, *Ditetapkan Jadi Tersangka, Pelaku Penipuan Klaim Asuransi Kabur*, detik Surabaya (online), <http://www.surabaya.detik.com>, (23 Juli 2012).